

Analisis Penerapan Sak Etap Dalam Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara

Analysis Of Implementation Of Sak Etap In Recording And Financial Reporting In Village Owned Enterprises (Bumdes) In Lihunu Village, Likupang East District, Minahasa Utara District

Meisyel Gaghenggang, Herman Karamoy, Peter M. Kapojos

¹²Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail :

¹gmeisyel@gmail.com . ²herman.karamoy@unsrat.ac.id , ³peterkapojos@unsrat.ac.id

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk Mengetahui Penerapan Sak Etap Dalam Pencatatan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. 2) Untuk Mengetahui Penerapan Sak Etap Dalam Pelaporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes di Desa Lihunu belum menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.

Kata kunci: Analisis, Pencatatan laporan keuangan, Pelaporan Keuangan, SAK ETAP, BUMDes

ABSTRACT: The objectives of this study are: 1) To find out the implementation of SAK Etap in the recording of financial statements in village-owned enterprises (BUMDes) in Lihunu Village, East Likupang District, North Minahasa Regency. 2) To find out the application of SAK Etap in financial reporting in village-owned enterprises (BUMDes) in Lihunu Village, East Likupang District, North Minahasa Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method with primary and secondary data sources. Data collection methods through interviews, observation and documentation. The results of the study show that BUMDes in Lihunu Village have not implemented financial recording and reporting in accordance with SAK ETAP.

Keywords: Analysis, Recording of financial statements, Financial Reporting, SAK ETAP, BUMDes

1. PENDAHULUAN

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu dihadapkan pada persoalan pendapatan masyarakat. Biasanya peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat yaitu masyarakat perkotaan, sedangkan kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan hanya mendapat porsi yang kecil. Kesenjangan akses, pembangunan dan

Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)

infrastruktur antara kota dan desa harus diatasi. Kesejahteraan masyarakat pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, pemerintah Indonesia melalui lembaga pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa membentuk lembaga keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Permendesa Nomor 4 tahun 2015 BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki dari desa melalui

Diterima: 29-12-2022; Disetujui untuk Publikasi: 31-12-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dari definisi BUMDes dapat dilihat bahwa modal BUMDes sebagian besar berasal dari Desa sehingga dalam pengelolaan BUMDes harus berdasarkan prinsip-prinsip kooperatif, emansipatif, partisipatif, transparansi dan akuntabel (Hidayat, dkk,2018). Dengan begitu, setiap tahun BUMDes harus menyusun laporan keuangannya dengan baik dan benar. Laporan keuangan adalah catatan yang berisi informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan sebagai gambaran kinerja suatu perusahaan atau organisasi dan juga menggambarkan hasil yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan. Umumnya laporan keuangan perusahaan/badan yang telah *go public* memiliki akuntabilitas publik yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). BUMDes bukanlah perusahaan/badan yang *go public*, sehingga tidak memiliki akuntabilitas publik. BUMDes menerbitkan laporan keuangan tujuan umum untuk pengguna eksternal. Pengguna eksternal yang dimaksud adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, pengguna eksternal lainnya adalah kreditor. Dengan menerapkan SAK ETAP akan memberikan kemudahan akses pendanaan. Oleh karena itu, BUMDes dapat menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Biaya historis dan nilai wajar merupakan dasar pengukuran yang digunakan oleh SAK ETAP. Perlakuan akuntansi juga lebih sederhana dan rata-rata tidak berubah selama beberapa tahun. Dengan penerapan akuntansi yang baik, pelaku usaha juga dapat mengetahui bagaimana perkembangan usahanya.

SAK ETAP merupakan salah satu standar keuangan yang ditetapkan untuk mempermudah BUMDes dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan dari penyusunan SAK ETAP bukan hanya sebagai standar akuntansi keuangan yang layak bagi perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan yang belum *go public* termasuk BUMDes. Dalam SAK ETAP (2013) pada bab 3 tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini artinya bahwa BUMDes harus menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan SAK ETAP.

Desa Lihunu merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Badan Usaha Milik Desa di desa Lihunu bergerak dalam bidang permodalan yang menjalankan usaha dengan membantu memberikan permodalan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan usahanya. BUMDes di Desa Lihunu telah banyak membantu masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian dengan memberikan pinjaman untuk modal usaha. Dari sisi pertanggungjawaban, BUMDes belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)

1.1 Pencatatan dan Pelaporan Keuangan

Setiap kegiatan yang bersifat keuangan atau nilai moneter harus dicatat dan dilaporkan. Pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan pada setiap akhir periode, baik laporan keuangan bulanan maupun laporan keuangan tahunan.

1.2 Pengertian Laporan Keuangan

Ikatan Akuntansi Indonesia (2012) mengemukakan pengertian laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas.

1.3 Jenis – Jenis Laporan Keuangan

Menurut IAI (2009) dalam buku Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan laporan keuangan ada lima macam, yaitu:

1. Neraca

2. Laporan laba-rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012) tujuan laporan keuangan sebenarnya untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta posisi keuangan suatu perusahaan yang manfaatnya bagi sejumlah pemakai dalam mengambil keputusan.

1.5 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:5-8), laporan keuangan yang bermanfaat untuk pengguna informasi merupakan keharusan terdapat empat karakteristik yang akan diperbandingkan.

- a). Dapat dipahami
- b). Relevan
- c). Keandalan
- d). Dapat dibandingkan

1.6 Pengertian Analisa Laporan Keuangan

Menurut Harjito dan Martono (2011:51), analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi.

1.7 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Menurut SAK ETAP (2009) Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- a) tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; dan
- b) menerbitkan laporan keuangan bertujuan umum untuk pengguna eksternal.

1.8 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

- Pengakuan

Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)

Menurut IAI dalam SAK ETAP 2.24 (2009) Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan adalah proses pembentukan suatu pos dalam laporan laba rugi atau neraca yang memenuhi definisi suatu unsur dan kriteria.

- Pengukuran

Menurut IAI dalam SAK ETAP 2.30 (2009) Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang yang digunakan oleh suatu entitas untuk mengukur aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan.

- Penyajian

Menurut IAI dalam SAK ETAP 3.2 (2009) Penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP adalah penyajian wajar. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban.

- Pengungkapan

Menurut SAK ETAP (2013), pengungkapan adalah sebuah proses akuntansi dimana entitas menyatakan atau mengungkapkan:

- a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan.
- b) Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode.

1.9 Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2009), laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Dalam SAK ETAP 3.12 (2009) laporan keuangan entitas yang lengkap meliputi:

1. Neraca
2. Laporan Laba-Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

1.10 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1.11 Pengertian BUMDes

Menurut KEMENDAGRI (2010) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

1.12 Proses Pembentukan BUMDes

Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa desa yang mempertimbangkan:

- a) inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
- b) potensi usaha ekonomi desa;
- c) sumber daya alam di desa;
- d) sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes
- e) penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

1.13 Karakteristik BUMDes

Karakteristik BUMDes di artikel Nugrahaningsih et al. (2016) adalah:

- 1) Berbentuk Badan Hukum.
 - 2) Berusaha di bidang perekonomian (jasa, manufaktur, dan perdagangan)
 - 3) Modal terdiri dari penyertaan Pemdes dan penyertaan masyarakat dengan perbandingan 51% dan 49%.
 - 4) Menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa.
- Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*
- 5) Menjadi salah satu sumber pendapatan desa.
 - 6) Memberikan layanan pada masyarakat

1.14 Tujuan Pendirian BUMDes

Tujuan pendirian BUMDes dalam artikel Nasional (2007) empat tujuan utama pendirian BUMDes menurut buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

1.15 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Ridlwan (2014) Dalam pengelolaan BUMDes ada enam prinsip yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Kooperatif.
- 2) Partisipatif.
- 3) Emansipatif.
- 4) Akuntabel.
- 5) Sustainable.

1.16 Penelitian Terdahulu

- Sari, Maulinda Yuniar (2020) dengan judul Analisis Penerapan Sak Etap Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Purwoasri Berseri (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Purwoasri) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes) Purwoasri Berseri dapat dikatakan bahwa laporan keuangan BUMDes belum sesuai dengan SAK ETAP, karena ada beberapa faktor yang belum terpenuhi. Diantaranya yaitu, menggunakan akrual basis dan kas basis, belum dilakukan penyusutan atas aset tetap yang dimiliki, penyajian

aset tetap dan aset lancar tidak dipisahkan dan tidak diurutkan, belum melakukan beban penyusutan, laporan keuangan hanya neraca dan laba-rugi.

- Riki Gunanda, - (2020) dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Al-Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo Periode 2014-2018 dengan hasil penelitian BUMDES Al-Kautsar adalah terdapat beberapa masalah diantaranya yaitu; laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDES Al-kautsar tidak lengkap berdasarkan PSAK ETAP, kemudian adanya jumlah inventaris aset yang tidak sesuai dengan pencatatan, serta BUMDES Al-Kautsar tidak mencantumkan Pembayaran pajak mereka.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut pendapat Sugiyono (2013: 11), penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BUMDes di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2022.

2.3 Jenis Data, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi

2.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif dengan proses analisis yaitu :

- Reduksi Data (*Reduction Data*)
- Penyajian Data (*Data Display*)
- Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pencatatan Laporan Keuangan BUMDes di Desa Lihunu

1. Metode Pencatatan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pelaksana operasional BUMDes di Desa Lihunu memberikan jawaban terkait metode pencatatan yang dilakukan sebagai berikut :

“iya ada, kami menggunakan metode umum dalam pencatatan laporan keuangan yang dibuat”

2. Pencatatan Transaksi

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pelaksana operasional BUMDes di Desa Lihunu memberikan jawaban terkait pencatatan transaksi yang dilakukan sebagai berikut :

“ada, yaitu pencatatan penerimaan dan pengeluaran tetapi untuk sekarang tidak ada pencatatan pengeluaran karena pencatatan pengeluaran hanya dilakukan jika ada belanja dan mengikuti rapat”

3. Proses Pencatatan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pelaksana operasional BUMDes di Desa Lihunu memberikan jawaban terkait proses pencatatan yang dilakukan sebagai berikut :

“untuk proses pencatatan kami melakukan pencatatan dengan transaksi langsung dicatat pada buku catatan biasa selanjutnya dirangkum pada laporan keuangan akhir bulan”

4.1.2 Pelaporan Keuangan BUMDes di Desa Lihunu

1. Neraca

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pelaksana operasional BUMDes di Desa Lihunu memberikan jawaban sebagai berikut :

“kami tidak menyiapkan laporan neraca, tetapi kami mencatat akun kas dan piutang dalam laporan keuangan yang kami buat”

2. Laporan Laba Rugi

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pelaksana operasional BUMDes di Desa Lihunu memberikan jawaban sebagai berikut :

Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)

“kami tidak mencatat laporan laba rugi, tetapi laporan keuangan yang kami buat meliputi akun pendapatan dan akun beban keuangan seperti biaya administrasi”

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pelaksana operasional BUMDes di Desa Lihunu memberikan jawaban sebagai berikut :

“kami belum menyiapkan laporan perubahan ekuitas, tetapi laporan keuangan yang kami buat mencakup catatan pokok awal dan jumlah keuangan pada akhir periode”

4. Laporan Arus Kas

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pelaksana operasional BUMDes di Desa Lihunu memberikan jawaban sebagai berikut :

“kami tidak memiliki laporan arus kas yang konkrit, tetapi laporan keuangan kami memiliki catatan aktivitas pendanaan yaitu penerimaan dana dari pemerintah yang dicatat sebagai modal awal”

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

a) Gambaran Umum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaksana operasional BUMDes di Desa Lihunu :

“BUMDes di Desa Lihunu didirikan pada tanggal 4 Mei 2021. Untuk usaha yang dijalankan pada saat ini yaitu pemberian pinjaman modal usaha pada masyarakat”

b) Laporan Keuangan BUMDes

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pencatatan Laporan Keuangan BUMDes di Desa Lihunu Berdasarkan SAK ETAP

Berdasarkan hasil penelitian diketahui semua pencatatan laporan keuangan yang dibuat pada BUMDes di Desa Lihunu tidak sesuai dengan SAK ETAP. Maka peneliti menerapkan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP pada BUMDes di Desa Lihunu sebagai berikut:

Tabel 1
Jurnal Umum
BUMDes Bangka Lihunu Maju
Tahun 2021

Tanggal	Nama Akun	Post Ref	Debit	Kredit
	Kas di Bank	1.1.1.02		
	Penyertaan Modal Desa	3.1.1.01		
	Kas Tunai	1.1.1.01		
	Penyertaan Modal Desa	3.1.1.01		
	Piutang Usaha	1.1.2.01		
	Kas Tunai	1.1.1.01		
	Kas Tunai	1.1.1.01		
	Beban Administrasi dan Umum Lainnya	6.1.9.99		
	Kas Tunai	1.1.1.01		
	Piutang Usaha	1.1.2.01		
	Beban Bunga	9.2.2.01		

	Kas Tunai	1.1.1.01		
	Piutang Usaha	1.1.2.01		
	Beban Bunga	9.2.2.01		
	Pendapatan Denda	9.1.3.01		
		TOTAL		

Sumber. Hasil Pengolahan Data

Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)

Tabel 2
Buku Besar
BUMDes Bangka Lihunu Maju
Tahun 2021

Nomor Akun :

Nama Akun :

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit

Sumber. Hasil Pengolahan Data

Tabel 3
Neraca Saldo
BUMDes Bangka Lihunu Maju
Tahun 2021

No. Akun	Akun	Debit	Kredit
1.1.1.01	Kas Tunai		57.595.175
1.1.1.02	Kas di Bank	250.000	
1.1.2.01	Piutang Usaha	158.525.001	
3.1.1.01	Penyertaan Modal Desa		84.250.000
6.1.9.99	Beban Administrasi dan Umum Lainnya		2.450.000
9.1.3.01	Pendapatan Denda		928.826
9.2.2.01	Beban Bunga		13.551.000
	Jumlah	158.775.001	158.775.001

Sumber. Hasil Pengolahan Data

4.2.2 Pelaporan Keuangan BUMDes di Desa Lihunu Berdasarkan SAK ETAP

Berdasarkan hasil penelitian diketahui semua pelaporan keuangan yang dibuat pada BUMDes di Desa Lihunu tidak sesuai dengan SAK ETAP. Maka peneliti menerapkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP pada BUMDes di Desa Lihunu sebagai berikut:

Tabel 4
Neraca Saldo
BUMDes Bangka Lihunu Maju
Tahun 2021

No. Akun	Akun	Debit	Kredit
1.1.1.01	Kas Tunai		57.595.175
1.1.1.02	Kas di Bank	250.000	
1.1.2.01	Piutang Usaha	158.525.001	
3.1.1.01	Penyertaan Modal Desa		84.250.000
6.1.9.99	Beban Administrasi dan Umum Lainnya		2.450.000
9.1.3.01	Pendapatan Denda		928.826
9.2.2.01	Beban Bunga		13.551.000

	Jumlah	158.775.001	158.775.001
--	---------------	--------------------	--------------------

Sumber. Hasil Pengolahan Data

Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)

Tabel 5
Laporan Laba Rugi
BUMDes Bangka Lihunu Maju
Tahun 2021

Beban		
Beban Administrasi dan Umum Lainnya	2.450.000	
Total Beban Administrasi dan Umum		2.450.000
Pendapatan dan Beban Lain-lain		
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Denda	928.826	
Total Pendapatan Lain-lain		928.826
Beban Lain-lain		
Beban Bunga	13.551.000	
Total Beban Lain-lain		13.551.000
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain		14.479.826
Laba Bersih		31.409.652

Sumber. Hasil Pengolahan Data

Tabel 6
Laporan Perubahan Ekuitas
BUMDes Bangka Lihunu Maju
Tahun 2021

Penyertaan Modal	
Penyertaan Modal Desa	84.250.000
Penyertaan Modal Akhir	84.250.000
Laba Ditahan	
Laba (rugi) Periode Berjalan	31.409.652
Laba Ditahan Akhir	31.409.652
Ekuitas Akhir	115.659.652

Sumber. Hasil Pengolahan Data

Tabel 7
Laporan Arus Kas
BUMDes Bangka Lihunu Maju
Tahun 2021

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Arus Kas Masuk	
Penerimaan Kas dari Pendapatan Denda	928.826
Penerimaan Kas dari Biaya Administrasi dan Umum Lainnya	2.450.000
Penerimaan Kas dari Beban Bunga	13.551.000
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	16.929.826

Sumber. Hasil Pengolahan Data

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

a) Pendirian BUMDes:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara diketahui BUMDes di Desa Lihunu dibentuk pada tanggal 4 Mei 2021 dengan tujuan sebagai upaya

Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)

pemberdayaan, pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Aktivitas usaha yang dilakukan BUMDes di Desa Lihunu yaitu pemberian pinjaman modal usaha bagi masyarakat.

b) Ikhtisar Kebijakan SAK ETAP dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara diketahui bahwa dasar penyusunan laporan keuangan pada BUMDes di Desa Lihunu belum menerapkan kebijakan SAK ETAP pada catatan atas laporan keuangan karena hanya menggunakan metode umum pada penyusunan laporan keuangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari analisis yang telah dilakukan terhadap pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes di Desa Lihunu diketahui tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Sehubungan dengan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencatatan laporan keuangan pada BUMDes di Desa Lihunu menggunakan metode umum dalam pencatatan laporan keuangan yang dibuat yaitu pencatatan penerimaan dan pengeluaran tetapi untuk sekarang tidak ada pencatatan pengeluaran karena pencatatan pengeluaran hanya dilakukan jika ada belanja dan mengikuti rapat, Kemudian untuk proses pencatatan BUMDes melakukan pencatatan dengan transaksi langsung dicatat pada buku catatan biasa selanjutnya dirangkum pada laporan keuangan akhir bulan.
2. Pelaporan keuangan pada BUMDes di Desa Lihunu yaitu melaporkan kas, piutang, pendapatan dari bunga dan denda, beban keuangan yang dicatat sebagai biaya administrasi, pelaporan untuk jumlah modal awal dan jumlah keuangan dalam akhir periode, pelaporan aktivitas pendanaan yaitu penerimaan dana dari pemerintah yang dicatat sebagai modal awal, menjelaskan kapan berdiri BUMDes di Desa Lihunu dengan jenis usahanya kemudian pembuatan laporan keuangan seperti laporan keuangan bulanan dan tahunan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. BUMDes di Desa Lihunu sebaiknya mempekerjakan pegawai di bidang akuntansi yang memadai agar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Sebaiknya BUMDes di Desa Lihunu meningkatkan kesadaran akan pentingnya laporan keuangan yang lengkap dan penerapan standar SAK ETAP bagi penilaian kinerja mereka.
2. BUMDes di Desa Lihunu juga wajib membuat laporan keuangan sesuai SAK ETAP sekurang kurangnya dua kali dalam satu tahun, hal ini agar memudahkan pengurus BUMDes di Desa Lihunu dalam memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntansi Indonesia 2012, Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak). Jakarta : Salemba Empat

Agus Harjito Dan Martono, 2011. *Manajemen Keuangan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2013. Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

- Rudini, Nusrhayati, Dan Afriyanto, 2016, *Analisis Penerapan Sak Etap Pada Badan Milik Usaha (Bumdes) Langkitin Di Desa Langkitin*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Perairan, Vol. 2, No. 1, Tahun 2016
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, *Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.
- Sari, M. Y. 2020. *Analisis Penerapan Sak Etap Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Purwoasri Berseri (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Purwoasri)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang)
- Gunanda, R. 2020. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Al-Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo Periode 2014-2018* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).